



Bareskrim Tunggu Klarifikasi BPK

Soal Potensi Kerugian Negara Rp11,51 Triliun

JAKARTA-- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa terdapat potensi kerugian negara Rp 11,51 triliun selama semester I 2015 tidak membuat Bareskrim berg-

erak cepat. Lembaga yang dipimpin Anang Iskandar itu justru masih menunggu klarifikasi BPK.

Sesuai data BPK, dari 666 lembaga yang diperiksa terdapat 4.609 permasalahan yang berdampak financial senilai Rp 21,62 triliun. Angka itu terdiri dari potensi kerugian negara Rp 11,51 triliun,

◆ Ke Halaman 11 kolom 5

Bareskrim Tunggu Klarifikasi BPK

Sambungan dari halaman 1

kekurangan penerimaan negara Rp 7,85 triliun dan permasalahan yang mengakibatkan kerugian Rp 2,26 triliun.

Menanggapi masalah tersebut, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar mengaku sudah mengetahui temuan BPK. Namun, begitu penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara langsung. "Kami harus menunggu dulu," paparnya.

Sebab, seharusnya ada proses klarifikasi dari BPK terhadap temuan-temuan tersebut. Bila, telah diklarifikasi

dan ternyata memang ada pidananya, maka Bareskrim baru bertindak. "Kami tunggu klarifikasi ya," ujarnya singkat lalu masuk ke mobilnya kemarin.

Sementara Komisioner Kopolnas M Nasser menuturkan bahwa sangat wajar bila penegak hukum saat ini ragu menindaklanjuti temuan BPK. Pasalnya, terdapat himbauan pemerintah untuk tidak mempidanakan pelanggaran administrasi dan kebijakan. "Ini yang membuat ragu semua pihak," paparnya.

Bila penegak hukum nekat, maka bisa jadi dianggap tidak sesuai dengan arahan dari presiden. Tentunya, hal tersebut harus dibuat solusinya. "Masalah ini sangat serius, membuat penegakan hukum jadi kurang tajam," ujarnya.

Dia menganjurkan pada Bareskrim untuk segera memastikan apakah benar kerugian negara tersebut terjadi. Lalu, perlu dipastikan juga apakah itu pelanggaran administrasi dan kebijakan. "Bila ternyata bukan keduanya, maka polisi bisa bergerak dengan cepat," ujarnya. (idr)